

BANYAK KEPALA SEKOLAH SMA/SMK YANG BELUM PAHAM TERKAIT PUNGUTAN DAN SUMBANGAN PENDIDIKAN

Senin, 12 Maret 2018 - Indra

Manado/Senin, 12 Maret 2018 - Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara menyelenggarakan Rapat Koordinasi bertempat di Aula Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Dalam rapat koordinasi dan sosialisasi yang dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dr. (c) Sekolah SMA/SMK sederajat se-Sulawesi Utara tersebut menghadirkan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Utara. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik di bidang pendidikan pada Satuan Pendidikan Menengah yang bebas dari pungutan liar.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Utara dalam paparannya menyampaikan bahwa penyelenggaraan pendidikan di Satuan Pendidikan Menengah harus dilaksanakan secara berkualitas dan tanpa pungutan liar karena penyelenggaraan pendidikan merupakan hak asasi manusia Indonesia khususnya di Sulawesi Utara. Tindakan pungutan liar dalam pemberian pelayanan hanya akan merugikan masyarakat. Diperlukan adanya perubahan pola pikir dari para Kepala Sekolah dari mental kekuasaan menjadi mental melayani.

Terungkap dalam kegiatan ini masih banyak Kepala-Kepala Sekolah yang tidak mengetahui terkait peraturan perundang-undangan yang melarang pungutan liar serta kurang pahami perbedaan antara pungutan dan sumbangan dan syarat-syarat pelaksanaannya. Hal ini menyebabkan terjadinya berbagai jenis pungutan liar.

Kepala Dinas Pendidikan Daerah Sulawesi Utara menyampaikan terima kasih kepada Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Utara, Kepala Sekolah dan Kepala Dinas berkomitmen dengan jajarannya untuk menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dan bebas dari pungutan liar.

